



JURNAL Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

KOMPARASI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH DI INDIA DAN INDONESIA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

Sidqi Alfarez^{*a}, Syaifudin^b, Abrar^c

sidqi.alfarez@mhs.unj.ac.id(*)

^aUniversitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

^bUniversitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

^cUniversitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

Article history:

Received 29 August 2024; Revised 30 September 2024; Accepted 31 October 2024; Published 1 Desember 2024

Abstract: *The study aims to compare the curriculum of history education at the high school level in India and Indonesia. Especially on the basis of the problem of a decline in the Human Development Index in 2021 due to the COVID-19 pandemic which has an impact on the education sector. With that, we want to see how India and Indonesia can improve the human development index in the field of education through curriculum development. Method: The research method uses qualitative with a descriptive comparative approach with sources obtained through report ministry education. Findings: The results of the study show that India and Indonesia have a way of developing the curriculum. Especially in history education, the high school level has characteristics in approaches, foundations, allocations, and learning materials. Conclusion: India emphasizes humanism and essentialism as the foundation for history learning through interdisciplinary and local history learning, while Indonesia emphasizes the foundation of the philosophy of independent learning derived from humanism. Where the approach to learning history comes from chronological and thematic, especially the study material is in accordance with periodidation and historical themes.*

Keywords: *curriculum; India-Indonesia's education; assessment; history education.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum pendidikan sejarah di tingkat sekolah menengah di India dan Indonesia. Terutama atas dasar permasalahan penurunan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pendidikan. Dengan itu, kami ingin melihat bagaimana India dan Indonesia dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Metode: Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif dengan sumber yang diperoleh melalui pendidikan kementerian laporan. Temuan: Hasil penelitian

menunjukkan bahwa India dan Indonesia memiliki cara untuk mengembangkan kurikulum. Khusus dalam pendidikan sejarah, jenjang SMA memiliki karakteristik dalam pendekatan, Yayasan, alokasi, dan materi pembelajaran. Kesimpulan: India menekankan humanisme dan esensialisme sebagai landasan pembelajaran sejarah melalui pembelajaran sejarah interdisipliner dan lokal, sedangkan Indonesia menekankan landasan filosofi pembelajaran mandiri yang berasal dari humanisme. Dimana pendekatan pembelajaran sejarah berasal dari kronologis dan tematik, terutama materi kajiannya sesuai dengan periodisasi dan tema sejarah.

Kata kunci: kurikulum; pendidikan India-Indonesia; asesmen; pendidikan sejarah.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi situasi secara global. Terutama di bidang pendidikan, di mana terdapat masalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) setelah 32 tahun menghitung indeks pembangunan manusia terkait kesehatan, pendidikan, dan standar hidup suatu negara untuk pertama kalinya (UNDP, 2022). Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2021, telah terjadi penurunan hampir 90% untuk HDI di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada situasi pendidikan di mana kegiatan pembelajaran terganggu akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil data dari United Nations Development Programme (UNDP) selama pandemi COVID-19, hasil IPM telah menurun di seluruh dunia dari 21,7 (pada tahun 2020) menjadi 9,4 (pada tahun 2021) (UNHD, 2022). Secara khusus, India dan Indonesia hampir berbeda secara signifikan. Data dari laporan Indeks Pembangunan Manusia menempatkan India di posisi ke-132, sementara Indonesia berada di posisi 114 dari 191 negara (UNDP, 2022; Khodijah, 2023). Hal ini disebabkan oleh situasi perang Ukraina-Rusia, pandemi COVID-19, dan krisis pangan dan energi di Eropa.

Dampak penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada laporan 2021/2022 merupakan cara bagi negara-negara untuk bangkit dan pulih. Khususnya pendidikan merupakan sektor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya untuk melakukan pembangunan manusia. Hal ini diupayakan dengan mengembangkan kurikulum pasca pandemi COVID-19. India dan Indonesia sedang mengembangkan kurikulum baru pada tahun 2020 – 2023. India mengembangkan *National Curriculum Framework* (NCF) sementara Indonesia dengan Peta Kebijakan 2020 – 2035 mengembangkan Kurikulum Independen. Kedua negara merespon sebagai bentuk untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Permasalahan pendidikan berdasarkan *Human Rights Watch* (HRW) terkait penurunan IPM di India dan Indonesia masih memiliki kesenjangan, putus sekolah, dan diskriminasi (Khodijah, 2023). India telah mengalami masalah pendidikan seperti angka putus sekolah sekitar 40% dan diskriminasi kasta (pemisahan diri untuk duduk untuk kasta dalit dengan kasta tinggi). Sementara itu, Indonesia

juga merasakan permasalahan pendidikan yang sama seperti ketimpangan, infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata, serta keterbatasan TIK di daerah 3T (Ihsan, 2021).

Selain masalah umum dalam pendidikan karena kebijakan pemerintah India dan Indonesia. Dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2023, India masih menetapkan mata pelajaran sejarah dalam struktur kurikulum *National Curriculum Framework (NCF) 2023* yang diamanatkan dari *National Education Policy (NEP)*. Bahkan di Indonesia, dalam kurikulum mandiri, sejarah peminatan dihapus dan hanya sejarah Indonesia yang dipelajari. Hal ini dalam upaya menyederhanakan kurikulum yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim (Syahrizal, 2020). Terlihat bahwa potensi mata pelajaran sejarah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang tahun lalu menurun drastis. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan pembelajaran sejarah di India dan Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui posisi pendidikan sejarah di tingkat SMA dalam kurikulum kedua negara pada tahun 2023.

Pengertian kurikulum terus berkembang seiring dengan perubahan yang terus terjadi dalam teori dan praktik pendidikan. Karena beragam pandangan para ahli tentang makna kurikulum, sulit untuk secara teoritis menetapkan definisi tunggal yang dapat mencakup semua perspektif ini. Konsep kurikulum dalam perkembangannya juga bervariasi sesuai dengan sekolah atau teori pendidikan yang dipatuhi. Menurut hasil penelitian, setidaknya ada tiga dimensi utama dalam memahami kurikulum, yaitu; kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi (Darman, 2021)

Aspek pertama adalah kurikulum sebagai substansi, dalam dimensi ini kurikulum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum dijabarkan dalam dokumen tertulis yang meliputi perumusan tujuan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode evaluasi. Dimensi kedua adalah kurikulum sebagai sebuah sistem. Dalam konsep ini, kurikulum dipandang sebagai bagian integral dari sistem sekolah, sistem pendidikan, dan bahkan bagian dari sistem sosial masyarakat. Sistem kurikulum akan melibatkan struktur personel dan prosedur operasional yang merinci bagaimana kurikulum disiapkan, diimplementasikan, dievaluasi, dan juga disempurnakan. Sedangkan dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai bidang studi, pada dimensi ini kurikulum menjadi objek studi oleh para ahli di bidang kurikulum. Tujuan dalam dimensi ini adalah untuk mengembangkan pemahaman ilmiah tentang kurikulum dan sistem kurikulum.

Khusus dalam pengembangan kurikulum pendidikan sejarah menjadi subjek yang penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum dikembangkan dalam mencapai tujuan nasional dan landasan pendidikan sebagai dasar dalam menentukan pembangunan nasional (Zainal et al, 2019). Upaya dalam kurikulum nasional untuk melakukan pengembangan pendidikan karakter. Melalui pendidikan sejarah diharapkan dapat mengemban untuk dapat mengembangkan karakter peserta didik melalui nilai-nilai historis. Tujuan dari pendidikan sejarah termasuk untuk menciptakan karakter patriotisme dan nasionalis di kalangan peserta didik. Diharapkan dapat mengatasi permasalahan krisis identitas yang banyak dialami oleh negara berkembang akibat pengaruh globalisasi seperti Indonesia maupun India.

Indonesia dalam mengembangkan kurikulum turut memasukan subjek sejarah dalam tingkat menengah atas, begitupun dengan India dimasukan dalam Secondary School sebagai subjek. Pendidikan sejarah di Indonesia membuat subjek tersebut menjadi terpisah dalam pelajaran *social science* (ilmu sosial), sedangkan India menjadi terintegrasi dalam *social science* sebagai rumpun induk ilmu pengetahuan (NCERT, 2023). Pendidikan sejarah di India berusaha sama dalam membentuk manusia kini yang berkarakter melalui fase-fase penting masa lalu, narasi peristiwa, dan pandangan holistik tentang sejarah yang menekankan pada evolusi manusia. Hal ini dapat dipelajari bagi pengembangan pendidikan sejarah berbasis karakter yang sedang dikembangkan Indonesia melalui Pusat Pendidikan Karakter (Puspeka), karena pendidikan sejarah mengemban dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan itu, kajian ini mencoba untuk melakukan komprasi bagaimana pengembangan desain pendidikan sejarah di India maupun Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan perbandingan kurikulum pendidikan sejarah di India dan Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ministry of Education dari India dan Indonesia, dengan sampel terkhusus pada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (Indonesia) dan *National Steering Commitee* dan *National Council of Educational Research and Training* (India). Desain penelitian ini menggunakan studi kualitatif komparatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles and Hubberman (2014), yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga mencapai titik jenuh. Analisis meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian Data, kesimpulan/Verifikasi. Terutama melalui analisis narasi yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan di India dan Indonesia.

Pengumpulan sumber dilakukan dengan studi pustaka, terutama menggunakan hasil laporan dari kementerian India dan Indonesia. Sumber yang digunakan dalam menganalisis kurikulum komparatif adalah melalui laporan Kementerian Pendidikan India dan Indonesia. Sehingga sampel yang digunakan adalah laporan kurikulum pendidikan India dan Indonesia. Laporan ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan India dikembangkan oleh *National Steering Commitee* dan *National Council of Educational Research amd Training* (NCERT).

Tabel 1. Buku Laporan Kurikulum India dan Indonesia

Negara	Kurikulum	Report Book Title	Tahun Publikasi
India	National Curriculum Framework (NCF)	National Curriculum Framework for School Education 2023	2023
Indonesia	Kurikulum Merdeka	Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	2024

Sumber: diolah dari data pribadi peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Abrar (2015) membandingkan kurikulum pendidikan Sejarah di Indonesia dan Australia, disebutkan bahwa sistem pendidikan keduanya tidak jauh berbeda, namun dari segi dimensi, Indonesia sangat multidimensi seperti fondasi. Sementara itu, Australia mementingkan kurikulum dengan landasan esensialisme. Selain itu, penelitian lain dari (Zainal et al, 2019) melakukan komparasi terhadap ditinjau dari aspek historis dan kurikulum *history education* di Malaysia dan Indonesia. Malaysia untuk *history subjects in primary schools were introduced* in 2014, sedangkan Indonesia baru diperkenal subjek sejarah pada tahun 2013. Sama halnya dengan penelitian ini juga akan membandingkan kurikulum Indonesia dan India, khususnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Sejarah. Analisis mencakup beberapa hal, yaitu; (1) Struktur jenjang pendidikan, (2) Landasan Pendidikan, (3) Materi Sejarah, dan (4) Penilaian Pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan India dan Indonesia

Sebuah sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang disusun secara sistematis yang terhubung satu sama lain, sehingga membentuk satu unit. Sistem pendidikan juga merupakan unit dari serangkaian sub-komponen yang saling berhubungan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Purwaningsih et al., 2022). Sistem pendidikan umumnya terkandung dalam dasar hukum yang diatur oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan nasional.

Kebijakan sistem pendidikan di India diatur oleh *National Steering Committee* dan *National Council of Educational Research and Training* (NCERT) untuk *National Curriculum Framework* (NCF) secara khusus didirikan pada tahun 2023 sebagai lembaga sistem pendidikan nasional. Landasan dasar dalam membentuk kebijakan pendidikan di India melalui visi masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Nasional 2020 sebagai pengembangan kurikulum NCF di India (*National Steering Committee India, 2023*). Kemudian tujuan pendidikan nasional diturunkan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu *National Curriculum Framework* (NCF). NCF sebagai kurikulum sangat responsif terhadap keragaman dan persatuan masyarakat India.

National Curriculum Framework (NCF) pada tahun 2023 sebagai sistem pendidikan nasional India berupaya mewujudkan transformasi positif pendidikan di sekolah. Apa yang dicatat dalam transformasi pendidikan di India adalah perubahan signifikan dalam pedagogi. Terutama komponen pedagogis yang terkait dengan silabus, materi pengajaran dan pembelajaran termasuk materi bermain, buku kerja, dan buku teks, serta metode penilaian (National Steering Committee India, 2023). Selain memperkuat pedagogi, NCF berupaya memperhatikan lingkungan dan budaya sekolah sebagai upaya transformasi holistik, multidisiplin, dan *broad-based education* untuk pengalaman belajar siswa. Semua ini dilakukan dalam mewujudkan 2030 Agenda untuk *Sustainable Development* (SD) melalui NEP 2020 oleh pemerintah India masa Perdana Menteri Narendra Modi (Panditrao, M. M., & Panditrao, M. M, 2020).

Dalam upaya transformasi pendidikan dengan NEP 2020 melalui *National Curriculum Framework* (NCF) pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan tahapan pendidikan dalam mengejar. Pola yang diterapkan adalah 5+3+3+4 dalam pendidikan di India (National Steering Committee India, 2023). Tahap pertama dari Tahap Dasar (5 tahun) memiliki 2 bagian, yaitu *Anganwadi/Pra-Sekolah* selama 3 tahun dan Sekolah Dasar selama 2 tahun di kelas 1-2. Tahap kedua adalah Tahap Persiapan selama 3 tahun di kelas 3-5. Tahap ketiga sama dengan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, dasar hukumnya menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan pendidikan yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Seluruh kebijakan pendidikan mulai dari struktur, tujuan, sistem, hingga kurikulum tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Marzuki, 2012). Sistem pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menargetkan potensi siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kurikulum yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2021-sekarang menjadi Kurikulum Merdeka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Semua dasar pengembangan dan implementasi kurikulum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan kebijakan dengan konsep Merdeka Belajar yang terdiri dari; Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Berbagi Mandiri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Secara garis besar, merdeka belajar terkait dengan hak atas kebebasan individu dalam belajar. Ciri-ciri Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang fleksibel, fokus pada materi esensial, dan pengembangan *softskill*.

Pengembangan desain tahapan kurikulum merdeka sama dengan kurikulum 2013. Secara umum, di Indonesia, sekolah berdasarkan jenjang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Abrar, 2015). Pola penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah 2+6+3+3. Pada tahap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan selama 2 tahun sebelum memasuki sekolah dasar (SD). Pendidikan dasar di Indonesia dilaksanakan selama 6 tahun mulai saat memasuki Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pendidikan menengah selama 6 tahun yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama

(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Pada pendidikan tinggi, umumnya disesuaikan dengan jenis pendidikan yang diambil oleh sarjana atau diploma.

Berdasarkan dua perbandingan sistem pendidikan India dan Indonesia, terdapat persamaan dan perbedaan. Pertama adalah persamaan bahwa India dan Indonesia mengembangkan kurikulum berdasarkan dasar hukum berdasarkan kebijakan pemerintah. Seperti di India, dasar hukumnya didasarkan pada *National Education Policy (NEP)* tahun 2020 dan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam mengembangkan kurikulum. Perbedaannya terlihat pada tujuan pendidikan nasional. Indonesia mewujudkan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan di masa depan, terdidik, mulia, adaptif dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045, sedangkan India memiliki tujuan pendidikan nasional dalam pengembangan *National Curriculum Framework (NCF)* untuk mengembangkan manusia baik yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional, memiliki kasih sayang dan empati, keberanian dan ketahanan, perilaku ilmiah dan imajinasi kreatif dengan mengandalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan (Khodijah et al., 2023).

Tabel 2. Perbandingan Struktur Pendidikan di India dan Indonesia

Kelas	Stage/Jenjang	
	India	Indonesia
12	<i>Secondary Stage</i> 4 Tahun	Pendidikan Menengah Atas SMA/SMK/MA 3 Tahun
11		
10		
9		Pendidikan Menengah Pertama SMP/MTs 3 Tahun
8		
7		
6	<i>Preparatory Stage</i> 3 Tahun	Pendidikan Dasar SD/MI 6 Tahun
5		
4		
3	<i>Primary Stage</i> 2 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini TK/RA 2 Tahun
2		
1		
Pre School	<i>Anganwadi/Pre-School</i> 3 Tahun	

Tabel 2 menunjukkan perbandingan struktur tingkat pendidikan India-Indonesia. Tampaknya serupa antara India dan Indonesia bahwa wajib belajar selama 12 tahun. Rentang usia dalam penerapan level ini adalah antara 6 – 18 tahun. Pada awal masuk sekolah dasar (SD) pada usia 6 atau 7 tahun dan meninggalkan SMA pada usia 17 atau 18 tahun. Meskipun tampak berbeda dalam menentukan masa studi pada setiap jenjang atau tahapan pendidikan baik di India maupun Indonesia.

Landasan Pendidikan Kurikulum India dan Indonesia

Tahun 2020 akan dikenang sebagai periode yang sulit bagi orang-orang di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pandemi ini mendorong banyak negara untuk mereformasi kebijakan sistem pendidikannya agar sesuai dengan kondisi saat itu, termasuk India dan Indonesia. Pada tahun 2020, kedua negara mengeluarkan kebijakan terbaru terkait kurikulum pendidikan di negara masing-masing.

Reformasi dalam sistem kurikulum India dimulai ketika pemerintah mengadopsi *National Education Policy* (NEP) pada tahun 2020. Kebijakan Pendidikan Nasional ini bertujuan untuk merestrukturisasi regulasi dan tata kelola sistem pendidikan India untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di negara tersebut. NEP 2020 merupakan dokumen komprehensif yang komponen utamanya menyangkut penerapan kurikulum baru yang holistik, fleksibel, multidisiplin, dan berpusat pada siswa untuk dapat mengembangkan karirnya di setiap level pendidikan (Sundaram, 2020).

Kurikulum baru ini dirancang untuk mendorong keterampilan kritis, kreatif, dan pemecahan masalah di kalangan siswa, oleh karena itu dalam penerapannya kurikulum ini disertai dengan perubahan lain seperti revisi buku teks, metode pengajaran yang lebih berpusat pada siswa, perubahan sistem penilaian dan program pelatihan guru. (Mita Banerjee, 2023). Prinsip dasar pengembangan kurikulum adalah membangun pembelajaran interdisipliner, pengalaman dan holistik yang akan membantu siswa mengembangkan keterampilan dan kompetensi untuk mencapai kesuksesan di abad ke-21 tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan tradisi India.

Kebijakan dalam kurikulum India dipengaruhi oleh filosofi masyarakat India kuno yang menganggap bahwa pengejaran pengetahuan (*Jnan*), kebijaksanaan (*Pragyaa*), dan kebenaran (*Satya*) adalah tujuan tertinggi kehidupan manusia (Chutia et al, 2022). Filosofi India kuno yang menjiwai tujuan sistem pendidikan India saat ini adalah untuk mengembangkan manusia yang baik yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional, memiliki kasih sayang dan empati, keberanian dan ketahanan, sifat ilmiah dan imajinasi kreatif dengan landasan etika dan nilai-nilai yang baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam dokumen *National Education Policy*, India menyatakan bahwa tujuan pendidikan India saat ini tidak hanya difokuskan pada pengembangan kompetensi kognitif dasar seperti literasi dan numerasi tetapi juga kompetensi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan membangun kapasitas dan karakter sosial, etika dan emosional (National Education Policy, 2020)

Sama seperti di India, Kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan di Indonesia lahir ketika pandemi pecah dan menyebabkan krisis pembelajaran di Indonesia. Pandemi pada akhirnya memperkuat kesadaran akan besarnya ketimpangan kualitas pembelajaran di Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya pemulihan pendidikan dengan memperkenalkan konsep "Kurikulum Merdeka". Kurikulum Merdeka

menandai lahirnya perubahan sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam hal metode pembelajaran yang telah bergeser dari pendekatan konvensional menjadi pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa. Kurikulum ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan mengembangkan karakternya, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. (Juditya, 2023).

Dasar utama untuk merancang Kurikulum Merdeka adalah filosofi Pembelajaran Mandiri. Filosofi ini juga menjadi dasar kebijakan lain sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan tersebut mencerminkan perubahan kurikulum, di mana Kurikulum Merdeka saat ini fleksibel, berfokus pada kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan interpersonal, serta mengakomodasi kebutuhan global. Filosofi Kebebasan Belajar yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi landasan kunci dalam merumuskan prinsip-prinsip desain kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia (Anggraena et al., 2022)

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kemandirian bukan hanya tujuan pendidikan, tetapi juga prinsip dasar yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini termasuk penggabungan kemampuan kognitif (pikiran), kecerdasan sosial-emosional (perasaan), keinginan untuk belajar, sikap, dan tindakan (disposisi atau afektif) untuk menghasilkan perubahan. Etika, dalam konteks ini, mengacu pada pengembangan kemampuan individu untuk menjadi pembelajar seumur hidup serta memiliki keterampilan dalam pengaturan diri dan menentukan arah pembelajaran. Visi Ki Hajar Dewantara semakin relevan dan semakin mendesak untuk diwujudkan oleh generasi muda Indonesia saat ini. Dalam rangka menghasilkan kurikulum yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan para pendiri bangsa, prinsip-prinsip berikut menjadi pedoman dalam proses perancangan kurikulum: 1) Sederhana, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan, 2) Fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa, 3) Fleksibel, 4) Selaras, 5) Gotong royong, 6) Mempertimbangkan hasil kajian dan umpan balik.

Tujuan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat dibagi menjadi dua tujuan yang lebih spesifik, yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional yang tertanam dalam konsep Profil Pelajar Pancasila yang menjadi pedoman utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan, dan menjadi pedoman dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Profil Pelajar Pancasila memiliki enam dimensi yang merupakan kesatuan sehingga setiap individu tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup yang kompeten, ber karakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila adalah: 1) iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, 2) kemandirian, 3) gotong royong, 4) keberagaman global, 5) berpikir kritis, dan 6) kreativitas. Kemudian yang kedua adalah tujuan ko-kurikuler yang merupakan tujuan untuk setiap mata pelajaran yang tercantum dalam unsur capaian pembelajaran (CP) dalam Kurikulum Merdeka

Perbandingan Kurikulum Pendidikan Sejarah India-Indonesia

Proses mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui sistem pendidikan nasional terkait dengan kurikulum sebagai perencanaan nasional. Kurikulum dalam definisi tersebut merupakan acuan utama untuk program sekolah yang dirancang dalam skala nasional (Sutarto, 2015). Dengan itu, kurikulum berperan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan memiliki struktur dalam proses pendidikan (Abrar, 2015). Hal ini terkait dengan mata pelajaran, kompetensi, dan jam pelajaran. India dalam mencapai kompetensi mata pelajaran dikenal sebagai *Curriculum Goals (CG)* dan *Competency (C)* dalam *National Curriculum Framework 2023*, sedangkan di Indonesia upaya untuk mencapai kompetensi dikenal sebagai *Capaian Pembelajaran (CP)* dalam Kurikulum Merdeka.

Tabel 3. Struktur Kurikulum di Indonesia

Subject	Annual Study Time Allocation		
	10	11	12
General Subjects			
Pendidikan Agama	72 (2)	72 (2)	64 (2)
Pendidikan Pancasila	54 (2) **	54 (2) **	48 (2) **
Bahasa Indonesia	108 (3)	108 (3)	96 (3)
Matematika	108 (3)	108 (3)	96 (3)
Bahasa Inggris	54 (2) **	54 (2) **	48 (2) **
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	72 (2)	64 (2)
Informatika	72 (2)	0	0
Seni dan Prakarya ***:	54 (2) **	54 (2) **	48 (2) **
Muatan Lokal	72 (2) ****	72 (2) *****	64 (2) *****
Sejarah	0	54 (2) **	48 (2) **
Elective Subjects (Grades 11 and 12 Only)			
Ilmu Pengetahuan Alam	216 (6)	720 – 900	640 - 800 (20 -
Ilmu Pengetahuan Sosial	288 (8)	(20-25) ****	25) ****
Bahasa, Prakarya, dan Kewirausahaan	0		
Other subjects developed according to available resources	0		

Keterangan:

- *** : Pembelajaran reguler non-penuh adalah 36 minggu, untuk memenuhi alokasi proyek
- *** : Maksimal 2 Jam Pelajaran per minggu atau 72 Jam Pelajaran per tahun
- **** : Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau kerajinan
- ***** : Total Jam Pelajaran tidak termasuk mata pelajaran konten lokal atau mata pelajaran tambahan

Kurikulum di Indonesia dikenal sebagai Kurikulum Merdeka. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 jenis, yaitu pembelajaran reguler (intrakurikuler) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Jam pelajaran ditetapkan berdasarkan alokasi tahunan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Pendekatan pembelajaran yang ditekankan

dalam Kurikulum Merdeka didasarkan pada sub mata pelajaran, tematik, dan terintegrasi. Hal ini terlihat pada mata pelajaran yang disusun dalam struktur kurikulum di Indonesia pada tabel 3.

Pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada tabel 2 yang mengacu pada mazhab humanisme. Dimana struktur kurikulum menunjukkan bahwa perkembangan siswa dapat dilihat dari keunikan, potensi, dan motivasi (Muslikh, 2020). Dengan itu, siswa dapat secara mandiri memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan motivasi karir ketika kelas 11 dan 12 sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih, namun kelas 10 tetap belajar secara umum, komprehensif, dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk dapat mengembangkan siswa berdasarkan potensi dan karakteristik individu.

Sementara itu, *National Curriculum Framework* (NCF) di India menekankan nilai kapasitas manusia, dan disposisi yang harus dikembangkan dengan tepat dalam pendidikan di sekolah. Mata pelajaran sebagai mata pelajaran ditekankan pada pendekatan integratif dan holistik (NCERT, 2023). Proses pembelajaran NCF dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran, konten, pedagogi, dan pendekatan penilaian. Proses pembelajaran dialokasikan proporsi tahun (periode) dan jam seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Alokasi waktu belajar dilakukan untuk hari kerja 1 jam pelajaran selama 50 menit dan akhir pekan (Sabtu) 1 jam pelajaran selama 30 menit untuk mata pelajaran.

Tabel 4. Struktur Kurikulum di India

Curricular Area	Secondary Stage Subject/Dicipline	Time Allocation	
		Annual Hours	Annual Periods
Humanities	R1	86	103.2
	R2	71	85.2
Math and Computing	Mathematic	143	171.6
	Computer Science		
	Business Mathematics		
Arts	Music	114	136.8
	Dance		
	Theatre		
	Sculpture		
	Painting		
	Film appreciation		
	Scriptwriting		
Physical Education (PE)	Specific sports	100	120
	Games		
	Yoga		
Science	Physics	129	154.8
	Chemistry		
	Biology		
Social Science (SS)	History	143	171.6
	Geography		

	Political Science		
	Psychology		
	Economics		
	Sociology		
Inter-Disciplinary Area (IDA)	Environmental Education	143	171.6
	Public, community health		
	The current form of home science		
	Knowledge of India		
	Traditions and Practices		
	Legal studies		
Vocational Education (VE)	Aligned to the National Skills	143	171.6
	Qualifications Framework (NSQF)		

Kurikulum yang dikembangkan di India juga berpola pada sekolah humanisme. Dimana penekanan ditempatkan pada potensi dan karakteristik siswa untuk memilih mata pelajaran. Di kelas 9 dan 10 Siswa akan menyelesaikan dua Mata Kuliah Esensial dari masing-masing dari delapan Bidang Kurikuler yang tersedia, yaitu, total 16 Mata Kuliah Esensial (NCERT, 2023). Selanjutnya, siswa harus melanjutkan dan menyelesaikan 16 mata kuliah pilihan untuk kelas 12.

Dalam struktur kurikulum kedua negara, mata pelajaran Sejarah ditetapkan dalam kluster ilmu sosial. Ada perbedaan dari segi pendekatan, fondasi, alokasi waktu, dan materi. Tabel 5 menyajikan perbedaan antara komponen-komponen ini. Pendekatan pembelajaran sejarah di India ditekankan pada Interdisipliner, Lokal, dan Tematik yang disesuaikan dengan lembaga sekolah dan negaranya. Dengan mengacu pada Tujuan Kurikulum (CG). Landasan pembelajaran di India mengacu pada sekolah esensialisme dan humanisme terutama sebagai pembentukan budaya dan pengetahuan manusia yang mengakar kuat tentang India. Alokasi pembelajaran disesuaikan dengan tahun dan jam berdasarkan bidang kurikuler. Selain itu, materi ditentukan berdasarkan tematik dalam CG, dan kompetensi (C) disesuaikan dengan lembaga pendidikan di negara bagian (NCERT, 2023).

Tabel 5. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Sejarah di India dan Indonesia

Information	History Education Curriculum	
	India	Indonesia
Approach	Interdisiplin, Lokal, Tematis	Kronologis dan Tematis
Foundation	Esensialisme, Humanisme	Merdeka Belajar
Time Allocation	171.6 / tahun (with social studies study)	72 jam / tahun

Learning Material/Competency	Ancient World States and Empires in India Towards Modernity Birth of the Nation	Pengantar Ilmu Sejarah Asal-Usul Nenek Moyang dan Jalur Rempah di Indonesia Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Kerajaan Islam di Indonesia Kolonisasi dan Perlawanan Bangsa Indonesia Pergerakan Kebangsaan Indonesia Pendudukan Jepang di Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Reformasi
---------------------------------	--	---

Sementara itu, di Indonesia, pembelajaran sejarah ditekankan pada kajian tematik dan kronologisnya, berdasarkan urutan peristiwa dan tema sejarah yang ditentukan oleh pemerintah. Ini menghilangkan beberapa tema dengan menyederhanakan kurikulum sebelumnya. Ini dirancang berdasarkan dasar esensialisme dan progresivisme, karena bertujuan untuk menumbuhkan pengalaman belajar dan mengubah siswa untuk masa depan (Muslikh, 2020). Dengan demikian, materi yang dipelajari masuk dalam tema esensial dan bermakna bagi pembentukan karakter bangsa.

Pengembangan kurikulum di India dan Indonesia merupakan respon terhadap dampak COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan, seperti hasil indeks pembangunan manusia menurun dari tahun 2020 hingga 2021. India menjalankan kebijakan pendidikan dalam menetapkan visi masyarakat dan tujuan pendidikan melalui Kebijakan Pendidikan Nasional 2020, sehingga terbentuknya kurikulum NCF pada tahun 2023. Sementara itu, di Indonesia, melalui landasan hukum, empiris, dan sosiologis, mengembangkan kurikulum mandiri (Kemendikbudristek RI, 2023). Sehingga pada setiap sub mata pelajaran dikembangkan pendekatan dan landasan sesuai dengan kurikulum, khususnya pendidikan sejarah.

Perbandingan Sistem Penilaian dalam Kurikulum India - Indonesia

Penilaian atau evaluasi memiliki peran penting dalam dinamika pembelajaran. Kegiatan penilaian meliputi pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber untuk menilai kemajuan, kebutuhan pembelajaran, dan pencapaian hasil belajar siswa dalam periode tertentu. Proses penilaian ini berguna dalam memberikan informasi kepada guru, orang tua, dan siswa

tentang prestasi mereka dalam belajar. Dengan informasi dari evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, guru dapat mengatur dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Kurikulum Kerangka Nasional 2023 sangat menekankan praktik dan evaluasi yang mendorong pembelajaran yang otentik. Sistem penilaian yang berkembang saat ini telah bergeser dari penilaian sumatif yang terutama menguji kemampuan menghafal menjadi sistem yang mendorong pendidik untuk menilai pembelajaran melalui metode seperti proyek, portofolio, dan aplikasi dunia nyata. Pada (NCF) 2023, penilaian memiliki dua tujuan, yaitu a) mengevaluasi hasil belajar siswa, b) menilai efisiensi metode dan materi pembelajaran. Asesmen juga digunakan untuk mensertifikasi pembelajaran dan penyelesaian pendidikan siswa pada tahapan penting, yaitu di kelas X dan XII. Dalam proses melakukan penilaian, pendidik harus mematuhi prinsip-prinsip penilaian yang efektif untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Penilaian harus mengukur pencapaian Kompetensi dan Hasil Pembelajaran yang sejalan dengan Tujuan Kurikuler.
2. Penilaian harus formatif, perkembangan, dan fokus pada pembelajaran.
3. Penilaian harus sesuai dengan tahapan.
4. Penilaian harus dapat disesuaikan dengan keragaman siswa.
5. Penilaian harus didukung oleh umpan balik yang tepat waktu, kredibel, dan konstruktif kepada siswa.
6. Penilaian harus mendukung akumulasi pembelajaran siswa yang bermakna.

Jenis penilaian yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran dapat berupa penilaian formatif dan sumatif. Asesmen formatif bersifat berkelanjutan, berkesinambungan dan dilakukan selama proses pembelajaran. Sementara itu, penilaian sumatif bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa pada akhir masa pembelajaran. Bentuk asesmen yang dapat digunakan oleh guru bervariasi dalam bentuk asesmen tertulis, asesmen lisan, asesmen praktis (proyek, portofolio, dll) dan asesmen dalam bentuk tes buku terbuka dimana siswa dapat menggunakan sumber buku dalam menjawab pertanyaan untuk menguji kemampuannya dalam mengolah dan menerapkan informasi daripada hanya mengingat.

Selain hal di atas, metode penilaian juga disesuaikan dengan tahapan perkembangan mahasiswa. Di kelas dasar (3 – 8 tahun) penilaian dalam bentuk tes ujian eksplisit dan tertulis sama sekali tidak ada. Metode penilaian yang digunakan pada tahap ini adalah mengamati dan menganalisis hasil pekerjaan anak sebagai bagian dari pengalaman belajar mereka. Pada kelas persiapan (usia 8 – 11 tahun) selain observasi dan analisis karya anak, berbagai penilaian formatif, baik lisan maupun tertulis, harus diperkenalkan. Setiap tahun pada tahap persiapan ini berakhir dengan penilaian sumatif menyeluruh tentang kesiapan siswa untuk kelas berikutnya. Siswa kelas menengah (11 – 14 tahun) diperkenalkan dengan penilaian praktis, proyek, eksperimen, dll. Asesmen sumatif juga dilakukan secara berkala secara komprehensif untuk menilai kesiapan mahasiswa memasuki

tahap berikutnya. Akhirnya, pada tahap sekunder (14-18 tahun), penilaian sumatif juga dilakukan secara rutin. Bentuk soal dirancang menggunakan soal berbasis kasus, simulasi dan esai untuk menilai kompetensi siswa. Di kelas X dan kelas XII pada tahap menengah, siswa akan diberikan ujian dewan yang meliputi ujian bahasa dan ujian mata pelajaran pilihan

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, tujuan penilaian dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran dan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk seluruh proses pembelajaran. Hasil evaluasi dapat menjadi panduan bagi guru dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa (Baruta, 2022). Selain itu, dari penilaian, seorang guru dapat mengidentifikasi gaya belajar siswa, mengevaluasi efektivitas pembelajaran mereka di kelas, dan memotivasi siswa untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasinya (Pusmenjar, 2022). Sama seperti penilaian yang diterapkan pada kurikulum India, penilaian dalam kurikulum independen telah bergeser orientasinya dari yang sebelumnya yang menekankan penilaian yang lebih sumatif menjadi penilaian yang menekankan penilaian formatif. Asesmen formatif memiliki tujuan untuk memantau pembelajaran siswa dan memberikan umpan balik secara berkesinambungan kepada guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sebaliknya, penilaian sumatif dilakukan oleh guru untuk memastikan apakah semua tujuan pembelajaran tercapai atau tidak.

Berdasarkan fungsinya, jenis asesmen dibagi menjadi tiga (Budiono & Hatif, 2023), yang pertama adalah asesmen sebagai pembelajaran (*assessment as a learning process*). Jenis penilaian ini kadang-kadang disebut sebagai penilaian formatif, digunakan oleh guru untuk merefleksikan proses pembelajaran untuk memahami bagaimana kemajuan siswa dalam pembelajaran. Contoh penerapan asesmen jenis ini di kelas adalah asesmen diri dan evaluasi sejawat. Kedua adalah penilaian untuk pembelajaran yang juga termasuk dalam kategori penilaian formatif yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Sedangkan asesmen pembelajaran ketiga, sering disebut sebagai asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran dan bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui apakah siswanya telah mencapai kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana pembelajaran.

Agar lebih mudah memahami hubungan antara jenis, fungsi, dan teknik penilaian, Arifin Nur Budiono (2023) menjelaskannya dalam tabel 5 yang bersumber dari buku "Panduan Pembelajaran dan Penilaian" dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran (2021)

Tabel 5. Sistem Penilaian di Indonesia

Types of Assessments	Function	Technical	Results/Documentation
Formatif (as and for learning)	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kemampuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Memberikan umpan balik kepada pendidik untuk meningkatkan kualitas 	Penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek,	<ol style="list-style-type: none"> Produk hasil belajar siswa Refleksi jurnal dari mahasiswa Strategi tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian Catatan hasil observasi selama proses pembelajaran

	<p>proses pembelajaran agar lebih bermakna.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk mengoptimalkan strategi pembelajaran mereka. Mengevaluasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi selama kegiatan pembelajaran di kelas. Merangsang perubahan suasana kelas dengan menerapkan program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 	<p>portofolio, serta tes tertulis, tes lisan, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> Catatan anekdot Nilai dalam angka
<p>for and of learning (Sumatif di akhir lingkup materi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Alat evaluasi untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa pada materi tertentu. Refleksi pembelajaran dalam suatu materi Umpan balik guru digunakan untuk merencanakan dan meningkatkan pembelajaran di periode berikutnya Menilai kekuatan dan kelemahan siswa selama proses pembelajaran dalam materi atau periode tertentu 	<p>Penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, serta tes tertulis, tes lisan, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk hasil pembelajaran. Nilai berupa angka.
<p>*Semester summative (of learning)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dalam jangka waktu tertentu. Memperoleh skor hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria pencapaian yang ditetapkan oleh guru/sekolah Ini dapat digunakan sebagai umpan balik yang berguna untuk merancang atau meningkatkan proses pembelajaran di semester atau tahun ajaran berikutnya (mirip dengan fungsi penilaian formatif). 	<p>Penilaian Praktek, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk hasil pembelajaran. Nilai berupa angka.

4. Menilai kekuatan dan kelemahan pembelajaran pada siswa (mirip dengan fungsi dalam penilaian diagnostik).

Selain dua asesmen di atas (sumatif & formatif), salah satu karakteristik asesmen dalam kurikulum independen adalah adanya asesmen diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang dilakukan oleh guru sebelum memberikan pembelajaran untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan siswa sehingga guru dapat menyesuaikan metode mengajarnya sesuai dengan kondisi siswa. Namun, menurut Sigalingging (2023), penilaian diagnostik perlu dilakukan secara berkala pada awal dan akhir pembelajaran. Pada awal tujuan penilaian diagnostik adalah untuk memetakan kemampuan siswa agar guru dapat merencanakan pembelajaran yang lebih efisien dan bermakna, kemudian pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru mampu dipahami oleh siswa atau tidak.

Dengan menerapkan penilaian diagnostik, guru dapat menerapkan pendekatan *all-the-right level* dengan menyesuaikan konten atau metode pembelajaran dengan kemampuan siswanya. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik siswa, penilaian harus mencakup aspek kognitif dan non-kognitif. (Labudasari et al., 2023). Penilaian diagnostik kognitif memberikan informasi dasar tentang sejauh mana siswa menguasai kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi yang diperlukan untuk belajar, tingkat pengetahuan awal dalam mata pelajaran tertentu, dan bagaimana siswa belajar. Di sisi lain, penilaian diagnostik non-kognitif dapat memberikan informasi tambahan tentang profil siswa, minat dan bakat mereka, dan kesiapan psikologis mereka untuk belajar. Penilaian diagnostik dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ujian tertulis, survei, wawancara, observasi, permainan, diskusi kelompok, tes psikologi, dan penilaian minat dan bakat, di antara metode lainnya. Hasil penilaian diagnostik dapat membantu guru mengidentifikasi materi yang memerlukan perhatian khusus, sehingga memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar siswa.

Pemerintah sendiri tidak mengatur secara rinci bagaimana penilaian harus dilakukan oleh guru. Namun, untuk memastikan bahwa penilaian berjalan dengan baik, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang memandu pendidik untuk menciptakan penilaian kreatif, kondisi, dan kebutuhan siswa. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. Penilaian adalah unit dari proses pembelajaran;
2. Penilaian dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi penilaian, pendidik diberikan fleksibilitas untuk menentukan teknik pelaksanaan dan waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif;
3. Penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya dengan tujuan menjelaskan kemajuan belajar siswa, mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang

harus diambil oleh guru dan sebagai dasar untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih baik

4. Laporan kemajuan pembelajaran siswa disusun secara sederhana dan informatif, memberikan informasi berharga tentang karakter dan kompetensi yang telah dicapai, serta strategi tindak lanjut;
5. Hasil penilaian digunakan oleh siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dari uraian penilaian dalam kurikulum India dan Indonesia di atas, secara umum terdapat kesamaan antara sistem penilaian kedua negara. Sistem penilaian pertama kedua negara menekankan penilaian formatif. Baik India maupun Indonesia telah meninggalkan sistem penilaian sumatif yang lebih menekankan pada hasil daripada proses. Kedua, asesmen bersifat holistik yang meliputi berbagai aspek tidak hanya kognitif tetapi juga aspek lain seperti psikomotorik, sosial, emosional dan keterampilan spiritual, sedangkan perbedaan sistem asesmen kedua negara terletak pada ujian standardisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ujian standar di India disebut Ujian Dewan yang diadakan di kelas X sebagai penentu untuk naik ke tingkat berikutnya dan Ujian Dewan Kelas XII sebagai salah satu persyaratan untuk masuk ke universitas. Di Indonesia sendiri, ujian standar seperti itu sudah lama dihapuskan, penentu kenaikan pangkat atau kelulusan menjadi otonomi sekolah.

SIMPULAN

Permasalahan terkait dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2021. Hal ini berdampak pada sektor pendidikan hampir 90% untuk HDI di seluruh dunia, berdampak pada situasi pendidikan di mana kegiatan pembelajaran terganggu akibat pandemi COVID-19. Semua negara berupaya pulih dari COVID-19 untuk pemulihan pendidikannya, terutama India dan Indonesia. Dalam menyusun tujuan pendidikan dan sistem pendidikan, India mengembangkannya melalui Kurikulum Kerangka Nasional, sedangkan di Indonesia melalui kebijakan Kurikulum Independen. Kedua negara merespon sebagai bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengembangan mutakhir di bidang pendidikan. Termasuk pendidikan sejarah termasuk dalam kurikulum di negara-negara ini.

Hasil perbandingan dapat dilihat bahwa India-Indonesia memiliki cara untuk mengembangkan kurikulum. Khusus dalam pendidikan sejarah memiliki karakteristik dalam pendekatan, yayasan, alokasi, dan materi pembelajaran. India menekankan humanisme dan esensialisme sebagai landasan pembelajaran sejarah melalui pembelajaran sejarah interdisipliner dan lokal sehingga materi lebih umum dibentuk dan disesuaikan dengan masing-masing negara bagian. Sementara itu, di Indonesia, penekanan ditempatkan pada fondasi filosofi belajar mandiri yang berasal dari humanisme. Dimana pendekatan pembelajaran sejarah berasal dari kronologis dan tematik, terutama materi kajiannya

sesuai dengan periodisasi dan tema sejarah. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrar. (2015). Kurikulum Sejarah Jenjang SMA: Sebuah Perbandingan Indonesia-Australia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1), 14–31. <https://doi.org/10.21009/JPS.041.02>
- Aimah, S. (2019). Kurikulum Pendidikan Tinggi Empat Negara Indonesia, India, Irak dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i2.400>
- Anggraena, Yogi, dkk. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek
- Anggraena, Yogi, dkk. (2021), *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek, edisi.1
- Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), 19-41.
- Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Implementation strategies of higher education part of national education policy 2020 of India towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), 283-325.
- Baruta, Yusuf. (2023). *Assesmen Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Budiono, Arifin Nur., Mochammad Hatip. (2023). Asesmen Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Matematika dan Pembelajaran*, 8(1). <https://doi.org/10.56013/axi.v8i1.2044>
- Banerjee, Mita. (2023). Implementation Of NEP 2020 Curriculum: An Overview. *Journal of Education and Culture*, 3(1), April 2023
- Chutia, U., Dutta, M. G., Kaur, H., Sing, B., & Shastri, M. A. (2022). Implementation Strategies of National Education Policy 2020: Psycho-Legal Analysis towards Achieving its Objectives. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 3058-3066.
- Ihsan, Reza Amin Nur et al. 2021. *Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1(1): 17–26. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i1.280>
- Jena, P. K. (2020). Impact of Covid-19 on higher education in India. *International Journal of Advanced Education and Research (IJAER)*, 5.
- Jianliang, Wang., Yang Yang. The Schemes, Purposes and Challenges of Primary and Secondary Educational Reform in India: Interpretation based on India's "National Education Policy Implementation Plan 2020". *Journal Education Science*, 2023, 39(1): 69-75. <https://jy.kx.lnnu.edu.cn/CN/Y2023/V39/I1/69>
- Juditya, Silvy. (2023). Pendidikan Jasmani Di Era Kurikulum Merdeka. PT. Pena Persada Kerta Utama
- Kalyani, Pawan. 2020. "An Empirical Study on NEP 2020 [National Education Policy] with Special Reference to the Future of Indian Education System and Its Effects on the Stakeholders." *Journal of Management Engineering and Information technology*, (7)5, October 2020. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4159546>

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2023). Struktur Kurikulum Merdeka dalam Setiap Fase. Diakses melalui Website Pusat Informasi Guru pada 17 Desember 2023
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2023). Laporan PISA Kemendikbudristek.
- Khasyi'in, N. (2021). Kajian Pendidikan Agama Islam di India. *Adiba: Journal Of Education*, 1(1), 6–18. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/issue/view/7>
- Khodijah, S., & Kusuma, H. (2023). Perbandingan Pendidikan Indonesia Dan India Tinjauan Kebijakan Terbaru. *Mukaddimah*, 8(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3150>
- Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. University of South Florida (USF) M3 Publishing, 3(2021), 36.
- Labudasari, E, dkk. (2023), *Kurikulum Merdeka Teori dan Praktik di Sekolah*. Penerbit Indonesia Emas Group.
- Marmoah. S, Roslan. R, Chaeroh. M, Elita. M.D, Fauziah. M. (2021). The Comparison of Education System in Australia and Indonesia. *JPI*, 10(4)
- Mayadi. M, Awang. M. M, Ahmad. A. R, Ahmad. A. (2019). Curriculum of History Education in Malaysia, Finland and Republic of Turkey: A Comparative Literature Analysis. *Global Conferences Series: Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*, Volume 2, 2019
- Mubarak, A Zaki. 2022. “Desain Kurikulum Merdeka Untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0” CV. Turats Press.
- National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2023). National Curriculum Framework for School Education. India: National Steering Committee
- Naijan. (2015). Kurikulum Pendidikan Sejarah di India. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1). <https://doi.org/10.21009/JPS.041.07>
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2022). Comparing countries' and economies' performance in mathematics Statistically above the OECD average from the OECD average Statistically below the OECD average PISA 2022 Results.
- Panditrao, M. M., & Panditrao, M. M. (2020). National Education Policy 2020: What is in it for a student, a parent, a teacher, or us, as a Higher Education Institution/University?. *Adesh University Journal of Medical Sciences & Research*, 2(2), 70-79.
- Purwaningsih, I., Oktariani, O., Hernawati, L., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). Pendidikan sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21-26. <https://doi.org/10.33394/vis.v10i1.5113>
- Rezeki, W., Amalia, T., & Ananda Putri, K. (2020). India Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*. 13(1). <https://doi.org/10.33541/jdp.v13i1>
- Sigalingging, Ropin. (2022). *Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Implementasi Kurikulum Merdeka The Differentiated Classroom*. Tata Akbar
- Sundaram, K. M. (2020). National Education Policy 1986 vs National Education Policy 2020—a Comparative Study. *International Research Journal on Advanced Science Hub*, 2(10), 127-131.
- Sutarto. 2015. *Dasar-Dasar Organisasi*, Cetakan Keduapuluh Tiga. Yogyakarta: UGM Press

- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Uncertain Lives: Shaping Our Future in a Changing World. Diakses melalui Website UNDP pada 12 Desember 2023.
- Tim Laporan Pemantauan Pendidikan Global. (2022). S I A P A Y A N G M E M I L I H ? S I A P A Y A N G R U G I ?. UNESCO
- Widodo, Hendro. (2023). *Pengembangan Kurikulum PAI*. UAD Press.
- Zainal. N, Awang. M. M, Ahmad A. R, Ahmad. A, Muhthar. A. (2019). A Comparative Study of History Education Curriculum in Malaysia and Indonesia. *Global Conferences Series: Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*, Volume 2, 2019